



DENPASAR RAIH
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2019

Hal. 4



PEMKAB KLUNGKUNG AKAN
UJI COBA BAHAN BAKAR DARI
SAMPAH

Hal. 13

HAL
08

BADUNG JUGA DUKUNG BENDUNGAN SIDAN

Gubernur Minta Acara Internasional Gunakan Aksara-Busana Bali

Gubernur Wayan Koster meminta penggunaan aksara dan busana adat Bali pada setiap kegiatan serta acara bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan di Pulau Dewata.

“Penggunaan busana adat Bali ini minimal pada waktu upacara pembukaan acara-acara tersebut. Saya tentunya sangat menghargai jika penggunaan busana adat Bali ini dilakukan terus-menerus selama berlangsungnya suatu acara,” kata Koster di Denpasar, Minggu.

Anjuran penggunaan aksara dan busana adat Bali tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor 3172 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 5 April lalu. Surat tersebut dialamatkan kepada lembaga kementerian, lembaga pemerintah non-pemerintah, konsulat jenderal negara sahabat, lembaga atau badan swasta, serta para “event organizer”.

Terkait penggunaan aksara Bali yakni pada backdrop atau latar belakang yang dipajang pada “venue-venue” utama acara tersebut. Aksara Bali itu pun harus ditempatkan di atas aksara Latin.

“Panitia acara dianjurkan mengenakan busana adat Bali, sedangkan peserta acara boleh menggunakan busana adat Bali atau busana adat daerah asalnya masing-masing,” ujarnya.

Perkecualian diberikan kepada ritual agama, seperti upacara pernikahan yang kerap diadakan di hotel-hotel. Pasangan pengantin, keluarga, serta pelaksana ritual boleh menggunakan busana yang sesuai dengan tradisi agama ataupun adatnya masing-masing.

Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan



Gubernur Bali Wayan Koster (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

“Tujuan kebijakan ini tentunya adalah pelestarian busana adat, bahasa, aksara dan sastra Bali, serta membangkitkan perekonomian rakyat kecil berbasis

budaya,” ucap Koster.

Dalam pertemuan-pertemuan berskala internasional tersebut pakaian resmi yang dikenakan para delegasi adalah setelan jas dan dasi gaya Barat. Hal ini tampaknya akan segera berubah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3172 Tahun 2019 tersebut. (ant)

Gubernur Bali Siapkan Ribuan Akses Poin Wifi Gratis Untuk Masyarakat



Gubernur Bali Wayan Koster (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Wayan Koster siap meluncurkan ribuan akses poin Wifi gratis untuk seluruh masyarakat Pulau Dewata pada sejumlah akses poin di wantilan desa adat, puskesmas, objek wisata,

sekolah, dan area publik lainnya. Peluncuran perdana akan melibatkan pelajar SD hingga SMA/SMK dan aparat desa di desa Dauh Waru, Kabupaten Jembrana pada Rabu (10/4).

“Dengan adanya akses Wifi

gratis ini, saya harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan perekonomian, kepariwisataan, memperkuat budaya, kesehatan dan pengetahuan sesuai dengan potensi lokal dan wawasan global yang dimiliki,” kata dia di Denpasar, Selasa.

Menurut Koster, ketersediaan infrastruktur informasi ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan ‘Bali Smart Island’. “Akses Wifi gratis ini diharapkan dapat menyentuh seluruh komponen masyarakat, baik itu desa adat, objek pariwisata, puskesmas, maupun sekolah baik dari tingkat SD hingga SMA/SMK,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Koster, akan tercipta pemerataan akses informasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali.

Wifi gratis itu, lanjut dia, sekaligus sebagai momentum memulai kreativitas dan ino-

vasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat namun tetap tidak melupakan akar budaya Bali sebagai spirit dalam mewujudkan “krama” atau warga Bali sejahtera.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Bali Nyoman Sujaya yang ditemui di sela-sela persiapan peluncuran Wifi gratis itu, menyampaikan bahwa layanan Wifi gratis telah dimulai pada 2018 di 311 titik.

Pada 2019, Pemprov Bali menargetkan sasaran 1.825 akses poin dengan lokasi penempatan di wantilan desa adat sejumlah 1.371 akses poin, puskesmas sejumlah 107 akses poin, objek wisata sejumlah 203 akses poin, SMA/SMK/SLB sejumlah 132 akses poin, serta area publik sejumlah 12 akses poin.

Pemasangan Wifi itu dilakukan secara bertahap dan pada 2020 dicanangkan telah terpasang sekitar 4.157 titik di seluruh Bali. (ant)

Bali Segera Bangun Fasilitas Teknologi Pascapanen



Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima rombongan tim dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Antaraneews Bali/Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan tidak ingin berlama-lama untuk mewujudkan rencana pembangunan fasilitas penanganan pascapanen produk pertanian dengan menggunakan teknologi iradiasi sinar gamma.

“Rencana pembangunan (fasilitas iradiasi gamma) ini merupakan pemberdayaan ha-

sil pertanian dan penyelesaian masalah pertanian di hilir,” kata Koster saat menerima rombongan tim dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, pembangunan fasilitas penanganan pascapanen hasil pertanian dengan iradiasi gamma merupakan salah satu wujud nyata dari pember-

lakukan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 mengenai pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal.

“Pergub ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Bali. Dengan teknologi, jadi produknya bisa bertahan lebih panjang, buah-buahan dan sayuran awet dan tahan lama, serta terbebas dari bakteri,” ujar gubernur.

Mengenai pendanaan yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp160 miliar, Koster yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali IB Wisnuardana menyatakan dirinya akan segera mencari solusi yang terbaik termasuk dengan mengupayakan alokasi anggaran dari pusat.

Sebelumnya dalam simakrama (tatap muka) dengan masyarakat Buleleng, Koster

menyebutkan pihaknya saat ini hanya memikirkan skema pembiayaan, karena lahan yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan iradiasi gamma di Buleleng sudah tersedia.

Lahan tersebut adalah milik Pemprov Bali seluas 22 hektare di kawasan Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. “Lahan untuk pembangunan iradiasi gamma ‘kan sudah siap, tinggal pakai itu. Kebutuhan lahan memang luas, karena harus ada pergudangan, ruang paking, dan penyortiran, sebelum masuk ke mesin pengolahan iradiasi gamma,” ucapnya.

Sementara itu, peneliti energi nuklir dari Batan Prof Yohannes Sardjono mengemukakan keunggulan dari penerapan iradiasi gamma pada produk pertanian dan peternakan yang mampu memperpanjang usia simpan produk tersebut. (ant)

Wagub Bali Minta Inspektorat Pertahankan WTP

Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, meminta jajaran Inspektorat setempat untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya agar mampu mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemprov setempat.

“Tidak mudah untuk mempertahankan opini WTP yang sudah bertahan selama lima tahun dan dengan kerja keras kita semua saya harap opini WTP ini bisa diraih kembali untuk keenam kalinya,” kata Wagub yang akrab dipanggil Cok Ace itu saat menyampaikan arahan pada pimpinan dan staf Inspektorat Bali di Denpasar, Jumat.

Ia berpandangan opini WTP merupakan sebuah penilaian yang sekaligus memberikan citra positif bagi Pemerintah Provinsi Bali di mata masyarakat, teru-

tama mengenai kinerja dan transparansi.

“Kalau boleh saya katakan opini tersebut merupakan etalase dan jajaran inspektorat adalah urat nadi dari citra baik Pemprov di mata masyarakat, karena masyarakat sangat perhatian terhadap pencapaian opini WTP tersebut,” ujar tokoh Puri Ubud itu.

Dalam kesempatan serupa, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada mengamini pernyataan Wagub Bali yang mengungkapkan opini WTP merupakan cerminan dari transparansi pemerintah daerah.

“Opini tersebut merupakan gambaran kepada masyarakat untuk kinerja pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis,” ucapnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mewujudkan “good governance”



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat memberikan arahan kepada jajaran Inspektorat Bali (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

melalui reformasi birokrasi serta efisiensi anggaran.

“Yang tak kalah penting, mendengarkan pula laporan-laporan masyarakat sesuai dengan salah satu indikator penting yakni pengawasan publik,” tambah Sugiada.

Sugiada juga menyebutkan, fungsi Inspektorat juga ibaratnya ‘rem’ bagi pemerintah dae-

rah untuk lebih efektif dalam penggunaan anggaran.

“Berperan semacam ‘early warning’ untuk pencegahan dini bagi pengguna anggaran. Maka dari itu kami juga akan melakukan pertemuan rutin dengan OPD-OPD untuk sama-sama mendampingi dalam penggunaan anggaran,” kata Sugiada. (ant)

Pemkot-Bawaslu Denpasar Bersihkan APK Pemilu 2019



Wakil Wali Kota Denpasar Jaya Negara melakukan rapat koordinasi menjelang Pemilu 2019 (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

Pemerintah Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar terus memantapkan koordinasi, seperti pembersihan alat peraga kampanye (APK) terkait masa tenang Pemilu 2019.

“Kami berharap Pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilu 2019 pada 17 April bisa berjalan

dengan lancar dan aman khususnya di Denpasar, dengan penggunaan hak pilih sebaik-baiknya,” kata Wawali Kota Denpasar Jaya Negara di Denpasar, Senin.

Ia mengharapkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Denpasar terutama forum kepala desa dan lurah agar berperan dan berpartisipasi aktif baik dalam

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

Jaya Negara mengatakan dalam memasuki masa tenang Pemilu 2019 selama tiga hari mulai 14-16 April, diharapkan Satpol PP Kota Denpasar bersama jajarannya untuk melakukan pembersihan dan penertiban terhadap APK yang masih terpasang di seputaran Denpasar.

Semua APK yang belum diturunkan, agar bisa dilakukan pembersihan oleh petugas Satpol PP Kota Denpasar dengan berkoordinasi bersama pihak Bawaslu agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Selain itu kepada para camat dengan berkoordinasi dengan forum kades dan lurah serta kepala lingkungan untuk memantau sehari menjelang pemilu (H-1) kesiapan pelaksanaan dari pada pembuatan Tempat Pemilihan Suara (TPS) di masing-masing

wilayahnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata saat diwawancarai dalam acara Koordinasi Keamanan Menjelang Pemilu 2019 di Kantor Walikota Denpasar mengatakan H-1 pelaksanaan Pemilu, semua APK harus sudah bersih.

“Saat ini kami bersama Satpol PP Kota Denpasar tengah melakukan penyisiran dan penurunan. Target H-1, semua APK sudah bersih sehingga tak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Ia juga mengimbau kepada semua camat agar pihak Trantib yang ada di wilayah kecamatan juga ikut turun melakukan pembersihan APK.

“Kami minta ke para camat agar Trantib di kecamatan juga digerakkan. Dan jika menemukan ada APK bisa dilaporkan agar nantinya bisa dibersihkan oleh petugas,” kata Ketua Bawaslu Denpasar Putu Arnata. (ant)

Denpasar Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Bali, karena sukses merancang program pembangunan keberlanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPP) Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis

Pemerintah Kota Denpasar sukses menjadi yang terbaik bersama dua kabupaten lainnya di Bali, yakni Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

Leonard VH.Tampubolon serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

Kepala Bapedda dan Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiastana Ika Putra menjelaskan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah guna mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten.

Selain itu juga, kata dia, mampu secara komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi.

Lebih lanjut Wiastana Ika



Wawali Kota Denpasar Jaya Negara menerima penghargaan dari Gubernur Bali Wayan Koster. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

mengatakan aspek dan kriteria penilaian meliputi proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kriteria penilaian pada proses “bottom-up, top-down”, teknokratik, politik, dan akuntabilitas pelaksanaannya, kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kriteria penilaian adalah keterkaitan dokumen RKPD.

“Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Pemer-

intah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali terhadap kinerja perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Denpasar. Tentu saja penghargaan ini tidak membuat Pemerintah Kota Denpasar berpuas diri. Melainkan akan terus memacu kinerja sebagai upaya untuk terus meningkatkan pembangunan di Kota Denpasar dengan perencanaan yang strategis serta terarah dan tepat sasaran,” ujar Jaya Negara. (ant)

Denpasar Masuk Peringkat Ketiga Kota Sehat Se-Asia Tenggara



Pemkot Denpasar sediakan berbagai fasilitas umum untuk masyarakat agar selalu sehat. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

Kota Denpasar, Bali selain masuk dalam 10 Kota Sehat Dunia, dengan meraih posisi tiga besar Kota Sehat se-Asia Tenggara (ASEAN) versi Travel Supermarket, ujar Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di Denpasar, Minggu.

Secara berurutan Kota Sehat Se-ASEAN dari posisi per-

tama hingga 15, yakni Chiang Mai (61,87), Pattaya (47,66), Denpasar (24,69), Johor Baru (19,92) Jakarta (18,56), Bangkok (17,56), Kuala Lumpur (16,65), Phuket (15,37), Singapore (14,29), Hi Cgi Minh City (13,35), Penang (11,01), Ha Long (6,95), Phnom Peh (5,87), Hanoi (4,73), dan Siem Reap (0,89).

Rai Mantra mengatakan predikat ini tak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai terkait sarana kebugaran serta olahraga yang bisa digunakan masyarakat.

Selain itu, kata dia, pola hidup masyarakat yang juga turut andil dalam menjaga kebersihan menjadi elemen penting dalam mewujudkan Kota Sehat ini.

“Sebelumnya Denpasar juga sudah masuk dalam 10 besar Kota Sehat Dunia, dan kini se-Asia Tenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada semua elemen di Kota Denpasar yang sudah ikut andil dalam menciptakan Kota Denpasar yang sehat,” ucapnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Denpasar, dr. Luh Putu Sri Armini menambahkan bahwa dalam menentukan per-

ingkat di Travel Supermarket digunakan beragam sumber data, seperti kelompok peneliti pasar Euromonitor International, Trip Advisor, Yelp, hingga World Weather and Climate.

Travel Supermarket juga memiliki beberapa aspek penilaian sebagai tolak ukur kesehatan dalam sebuah kota. Beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah jumlah taman atau ruang terbuka hijau, gym, dan pusat kebugaran.

Selain itu, Travel Supermarket menilai, jumlah Spa, studio yoga, dan studio pilates yang terdapat pada kota tersebut.

Kuliner juga menjadi aspek penilaian penting dalam menyusun daftar 10 kota tersehat di dunia ini. Terkait makanan, Travel Supermarket menilai berapa banyak toko makanan sehat dan restoran dengan opsi vegan di tiap kota. (ant)

Wali Kota Denpasar Kukuhkan “Sabha Yowana” Lestarian Budaya

Wali Kota Denpasar, Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra melakukan pengukuhan kepada Sabha Yowana (kelompok pemuda) Udiyana Graha Santhi, Desa Pakraman Renon sebagai upaya mendukung pelestarian seni, budaya dan tradisi Bali.

“Ini sudah menjadi kewajiban kita bersama, karena itu kami dukung generasi muda agar berkumpul dalam ‘Sabha Yowana’ ini. Nanti dalam organisasi tersebut mereka akan bertukar pikiran dan membangun kreativitas serta melestarikan seni dan budaya Bali,” kata Rai Mantra di Denpasar, Kamis.

Wali Kota Rai Mantra menyambut baik adanya Sabha Yowana dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di Desa Renon. Keberadaan generasi muda sangat erat kaitannya dengan kemajuan Desa Pakraman. Namun demikian kemajuan ini hendaknya memberi-

kan dampak positif terhadap perkembangan tradisi dan kearifan lokal di Bali.

“Generasi muda ini adalah generasi milenial yang sangat mudah dan cepat menerima informasi, dan di sinilah peran Desa Pakraman, Klian Adat serta masyarakat untuk mengarahkan agar generasi muda tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif,” ujarnya.

Ke depan, Rai Mantra berharap adanya Sabha Yowana ini mampu menjembatani seluruh STT (sekaa teruna-teruni) se-Desa Renon serta mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman. Dengan demikian Desa Pakraman dapat terus maju dan menjadi sektor penting kemajuan kebudayaan di Bali.

Terkait dengan PHBS, Rai Mantra juga turut memberikan apresiasi. Hal ini lantaran masih banyaknya umat Hindu yang belum paham etika ke-pura. Dengan adanya PHBS



Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra lakukan pengukuhan “Sabha Yowana”. (FOTO ANTARA/HO-Antaraneews Bali/Komang Suparta)

ini walaupun diimplementasikan dengan tempat suci tangan dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat untuk membersihkan diri mulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan serta menghindari pura dari cemer atau cunctaka (kotor secara spiritual).

“Dengan demikian maka setiap umat Hindu yang hendak ngaturang bhakti dapat selalu

fokus serta memiliki manah suci ning nirmala,” katanya sembari mengajak semua pihak untuk mengurangi penggunaan plastik di area suci.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan “Karya Pemelaspasan Gedong Ratu Ayu serta peresmian Genah Mewajik” sebagai implementasi dari PHBS di kawasan tempat suci tersebut. (ant)

Bupati Badung Serahkan 298 SK CPNS



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyerahkan 298 SK CPNS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, di ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Senin (15/4). Antaranews Bali/Humas Badung

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Badung, I Ketut Suiasa serta Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan 298 Surat Keputusan (SK) CPNS Kabupaten Badung tahun anggaran 2018.

“Perekrutan CPNS ini telah menggunakan tes yang berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT),” ujar Bupati Giri Prasta, di Puspem Badung, Mangupu-

ra, Senin.

Dari 298 SK CPNS yang diserahkan Bupati Giri Prasta tersebut, terdiri dari 100 tenaga kesehatan berbagai bidang dan 198 tenaga guru pengajar.

Berdasarkan jenis formasi terdiri dari 273 orang formasi umum, tujuh orang formasi khusus eks, tenaga honorer K2, tiga orang formasi khusus penyandang disabilitas dan 15 orang formasi khusus lulusan

terbaik (cumlaude).

“Dari data sebelumnya ada 299 orang, namun setelah berproses menjadi 298 orang, itu dikarenakan faktor umur yang telah melewati batas sehingga Nomor Induk Kepegawaian tidak bisa diterbitkan padahal dari awal sudah lulus,” kata Giri Prasta.

Kepada para CPNS, Bupati Giri Prasta juga memberikan beberapa penekanan dan penajaman terutamanya terkait program dan kebijakan yang telah dilaksanakan yang telah tertuang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai program menyeluruh dan terpola, mulai dari hulu, tengah dan hilir.

“PPNSB ini ibarat sebagai satu air terjun yang dalam, ketika sudah mengalir semua masyarakat harus kena dan menikmati, ini yang dinamakan pemerataan dan keadilan, semua insan sama dapat dan sama rasa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-

banan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Gede Wijaya mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS.

“Penetapan NIP dari Kantor Regional X BKN Denpasar, telah diterima Pemkab Badung pada tanggal 28 Maret 2019, dengan jumlah sebanyak 298 dan 1 usul yang tidak memenuhi syarat karena melampaui persyaratan batas usia maksimal saat mendaftar, sehingga PPK menerbitkan SK CPNS yang akan diserahkan saat ini sebanyak 298 SK,” katanya. (adv)

Badung Ingin Jadi “Role Model” Pembangunan di Indonesia

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta ingin daerahnya jadi role model (teladan atau acuan) pembangunan di Indonesia.

“Kami sangat meyakini program-program di Badung bisa menjadi role model pembangunan di Indonesia. Untuk itu, kami berharap dukungan seluruh masyarakat Badung agar program-program yang sudah berjalan dapat terus dilaksanakan dan disempurnakan,” ujar Bupati Giri Prasta, saat penyerahan bantuan hibah kepada masyarakat Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Sabtu (13/5) malam.

Dalam kesempatan itu, Giri Prasta juga mengapresiasi semangat dan dukungan generasi milenial Kuta Utara terhadap program yang dimiliki Pemkab Badung.

Menurutnya, generasi muda milenial merupakan tulang punggung pembangunan Badung, karena itu pihaknya juga selalu mengajak para generasi muda untuk ikut mengisi pembangunan di Badung.

“Kami memberikan apresiasi atas gerakan milenial khususnya di Cangu ini dan masyarakat Badung pada umumnya. Karena keberhasilan program dan pembangunan di Badung tidak lepas dari dukungan semua komponen masyarakat yang ada,” katanya.

Dalam penyerahan bantuan itu, Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan dana hibah dengan total nilai sebesar Rp8,2 miliar kepada masyarakat setempat

“Sebenarnya total ada 44 proposal dengan nilai Rp45 miliar yang akan diserahkan. Akan tetapi, saat ini baru bisa direal-



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta berfoto dengan penerima bantuan hibah total sebesar Rp 8,2 miliar di Wantilan Pura Dalem Dukuh, Banjar Pipitan Cangu, Sabtu (13/5) malam. Antaranews Bali/Humas Badung

isasikan sebanyak 16 proposal dengan nilai sebesar Rp8,2 miliar. Sisanya masih dalam proses,” kata Giri Prasta.

Sementara itu, I Gede Suryanda Pratama selaku ketua panitia mewakili masyarakat setempat mengatakan, generasi muda dan masyarakat Cangu akan senantiasa mendukung program

dan kebijakan yang pro rakyat dari Pemkab Badung.

“Kami harap nantinya sinergitas antara pemerintah, kaum milenial dan masyarakat dari wilayah Kuta Utara akan semakin baik sehingga apa yang menjadi program pemerintah juga bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya. (adv)

Badung Bantu 250 Bedah Rumah Bagi Warga Bangli



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan program bedah rumah di Desa Songan B Kecamatan Kintamani, Bangli Kamis (11/4). Antaranews Bali/Humas Badung

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan bedah rumah sebanyak 250 unit yang merupakan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam pembangunan rumah sehat dan layak huni bagi warga Kabupaten Bangli.

“Bantuan bedah rumah ini merupakan salah satu bagian dari program ‘Angelus Bhuwana’ di Kabupaten Badung yang artinya dari Badung untuk Bali,” ujar Bupati Giri Prasta, di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Bangli, Kamis.

Ia menjelaskan, penya-

han bantuan BKK di Bangli itu merupakan lanjutan dari program pembangunan 2.000 unit Rumah Sehat Layak Huni yang sebelumnya sudah diserahkan di Kabupaten Buleleng, Tabanan, Jembrana yang berlanjut ke Kabupaten Bangli.

“Program ini kami lakukan di enam kabupaten di Bali. Dalam pelaksanaannya, saya meminta kepala desa atau Perbekel untuk membantu masyarakat penerima bantuan agar tidak ada bantuan yang salah sasaran,” katanya.

Bantuan sebanyak 250 unit bedah rumah di Bangli akan disebar ke beberapa wilayah yang terdiri dari ke Desa Abang Songan 12 unit, Desa Catur dua unit, Desa Songan A 33 unit, Desa Songan B 75 unit, Desa Suter lima unit, Desa Trunyan 118 unit dan Desa Abang Batudinding menerima bantuan lima unit bedah rumah.

Bupati Giri Prasta menambahkan, pihaknya berharap pembangunan rumah dapat dilaksanakan secara gotong royong, dimana masing-masing penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta dan tanpa potongan pajak.

“Pembangunan 2.000 unit rumah untuk enam kabupaten kami anggarkan Rp100 miliar. Untuk membangun Bali, kami mengikuti perjalanan Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan kami dari Badung membangun Bali juga dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar, mewakili masyarakat Bangli mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung bersama jajarannya atas penyerahan bantuan BKK untuk tujuh desa di Kecamatan Kintamani. (adv)

Badung Bantu Rp30 Miliar Untuk Gianyar

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengalokasikan bantuan dana hibah sebesar Rp30 miliar untuk Kabupaten Gianyar, yang pada tahap pertama telah diserahkan sebesar Rp18 miliar.

“Penyerahan dana hibah ini merupakan bagian dari program ‘Badung Angelus Bhuwana’ atau program Badung Berbagi dari Badung untuk Bali,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat menyerahkan bantuan di Wanitlan Pura Tirta Empul, Desa Manukarya, Gianyar, Rabu.

Dalam kesempatan itu, kehadiran Bupati Giri Prasta yang didampingi Wabup Badung, I Ketut Suiasa dan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, disambut antusias oleh masyarakat Gianyar yang diiringi dengan Tari Baris dan Tari Kekak.

Bupati Giri Prasta mengatakan, penyerahan bantuan itu sudah menjadi komitmennya

sejak awal untuk meringankan beban masyarakat dalam melestarikan dan menjaga adat, tradisi, seni dan budaya Bali.

“Bantuan hibah ini sebagai bentuk sayang kami terhadap sesama. Disinilah kami hadir bersama Pemkab Gianyar untuk meringankan beban masyarakat, saya kira sikap positif ini bisa dilakukan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depannya masyarakat harus bersatu dalam membangun Bali dengan konsep semakin banyak yang akan diajak bekerja, maka semakin ringan beban masyarakat Bali.

“Karena itu saya mengajak masyarakat, semeton, tokoh-tokoh Bali untuk mari bersama membangun, menjaga dan melestarikan Pulau Dewata yang kita cintai ini” kata Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastira, mewakili segenap masyara-



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (ketiga kanan) didampingi Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastira (kedua kiri) saat menyerahkan dana hibah tahap pertama di Kabupaten Gianyar, Rabu (10/4). Antaranews Bali/Humas Badung

kat Gianyar menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemkab Badung atas bantuan berupa dana hibah untuk membangun Kabupaten Gianyar.

“Saya berjanji akan mengawasi penuh bantuan ini sehingga pemanfaatnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bermasalah nantinya,” katanya.

Untuk penerimaan dana hibah tahap pertama tersebut,

telah diterima oleh Bendesa atau kepala desa adat dari 31 pekraman yang tersebar di tiga Kecamatan.

Dari Kecamatan Tegalalang menerima Rp3,15 miliar, Payangan Rp9,9 miliar dan Kecamatan Tampaksiring menerima Rp4,95 miliar. Sedangkan pada tahap kedua nanti, akan diserahkan dana sebesar Rp12,5 miliar untuk Kecamatan Sukawati, Ubud, Blahbatuh dan Gianyar. (adv)

Badung Cari Masukan Publik Untuk Ranperda Penanaman Modal



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Ranperda Penanaman Modal di Puspem Badung, Rabu (10/4). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menyelenggarakan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal untuk mencari masukan dari stakeholders atau pemangku kepentingan terkait.

“Konsultasi publik ini dalam rangka menetapkan arah kebi-

jakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha di Badung agar selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Badung, I Made

Agus Aryawan di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh stakeholders terhadap Ranperda Penanaman Modal yang telah disusun bersama tim dan telah melalui proses pembahasan.

“Saat ini kami undang stakeholders untuk mengkritisi dan memberikan masukan agar Ranperda ini lebih sempurna,” katanya.

Menindaklanjuti kebijakan penanaman modal, Dinas PMPTSP Badung juga telah menyiapkan grand design pengembangan penanaman modal, dengan langkah-langkah seperti, menyusun naskah strategis dan ranperda penanaman modal dengan slogan “Green Investment” (investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan), menyusun peta pikir.

Membuat portal khusus pelayanan penanaman modal berbasis daring, mengembangkan tujuh tipe pelayanan dalam urusan penanaman modal dan perizinan serta mengembangkan perizinan secara daring.

“Dengan diberlakukannya sistem pelayanan melalui Online Single Submission (OSS), masyarakat dan pengusaha yang telah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS di wilayah Badung dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah mencapai 4.833 dengan 21.615 komitmen,” kata Agus Aryawan.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengatakan, konsultasi publik itu sangat penting dan memiliki nilai strategis dalam proses penyusunan produk hukum daerah yang sangat dibutuhkan oleh Pemkab Badung dan seluruh stakeholders pembangunan. (adv)

Badung Juga Dukung Bendungan Sidan

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendukung pembangunan bendungan Sidan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat terutama untuk mengatasi persoalan kekurangan pasokan air bersih saat musim kemarau.

“Kami menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kami kepada pemerintah pusat, melalui pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Gianyar dan Bangli yang dijadikan salah satu program strategis nasional pada tahun 2018,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok Sidan, Badung, Kamis.

Ia mengatakan dibangunnya Bendungan Sidan dapat menjawab permasalahan ketersediaan air baku di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Badung. Pasalnya, wilayah Bali masih kekurangan sumber air baku

yang dapat diolah menjadi air bersih.

“Khusus di Kabupaten Badung, kami juga kekurangan 2.000 liter per detik. Di wilayah Badung Selatan saja kami kurang sekitar 890 liter per detik,” katanya.

Menurut dia, dengan dibangunnya Bendungan Sidan maka permasalahan kekurangan air dapat ditanggulangi dengan kapasitas bendungan yang memanfaatkan aliran Sungai Ayung itu dapat menghasilkan air baku sekitar 1.750 liter perdetik.

“Paling tidak dengan ini, kami bisa menangani permasalahan air. Karena di Bali, khususnya Badung yang merupakan daerah pariwisata, saat ini belum mampu mencukupi ketersediaan air bersih secara penuh 24 jam. Kami baru mampu 12-14 jam,” kata Wabup Suiasa.

Pihaknya juga berharap pemerintah pusat dan Pemprov Bali dapat kembali melakukan kajian guna mencari tempat-



Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi (kedua kanan), Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kiri), Wabup Badung I Ketut Suiasa (kanan) dan Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta (kiri) menekan sirine saat Groundbreaking Bendungan Sidan di Desa Belok Sidan, Badung, Bali, Kamis (4/4/2019). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

tempat lain yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan air bersih.

“Kami yakin permasalahan air ini bisa teratasi. Melalui prinsip pembangunan “Nangun Sat Kertih Loka Bali” oleh Pemprov dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana oleh kami di Badung yang disinergikan,

permasalahan itu bisa kami atasi bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan Bendungan Sidan yang ditarget selesai pada tahun 2021 mendatang tersebut diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. (adv)

Badung Serahkan Dana Hibah Pemugaran Pura di Bangli



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (ketiga kanan) menyerahkan bantuan dana hibah untuk pemugaran Pura Kawitan Kayu Selem di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Antaranews Bali/Humas Badung

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp3 miliar untuk pemugaran dan perluasan Pura Kawitan Kayu Selem di Desa Songan, Kintamani, Kabupaten Bangli.

“Bantuan ini merupakan komitmen Badung berbagi dari

Badung untuk Bali dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Komitmen ini dipegang teguh untuk meringankan beban pribadi serta komunal masyarakat,” ujar Giri Prasta, dalam kutipan keterangan pers Humas Badung yang diterima di Mangupura, Minggu.

Ia berharap, bantuan itu dapat meringankan dan membantu warga setempat dalam melakukan ritual dan persembahyangan kepada Tuhan.

“Dengan tagline “Badung Angelus Buana” ini, kami ingin menjalankan program Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran. Program itulah yang kami implementasikan dengan dari Badung membangun Bali dari pinggiran,” katanya.

Bentuk lain dari program itu adalah, dengan mulai terealisasinya pembangunan 2.000 unit rumah sehat layak huni untuk enam kabupaten di Pulau Bali, dengan anggaran total sebesar Rp100 miliar.

Setelah program bedah rumah tuntas, akan berlanjut dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada setiap keluarga untuk membuat usaha dengan bantuan Rp15 juta.

“Inilah yang ingin kami lakukan membangun Bali secara holistik dan menyeluruh dengan mengamalkan Pancasila yaitu sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang artinya semua insan sama dapat dan sama rasa,” kata Giri Prasta.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengapresiasi Bupati Badung yang telah hadir menemui warga Kayu Selem dan memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp3 miliar, guna mendukung Pembangunan Pura Kawitan Kayu Selem Songan Bangli.

“Saya merasa bangga sekali karena baru pertama kali semenjak saya menjabat Wakil Bupati Bangli, ini merupakan bantuan hibah dengan nilai yang luar biasa. Tidak berhenti sampai disini, tahun ini di anggaran induk kami, warga Bangli juga dibantu Rp21 miliar lebih,” ujarnya. (adv)

Pemkab Sleman Pelajari Inovasi Pemerintahan ke Badung

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengunjungi Kabupaten Badung, Bali, dalam rangka saling bertukar informasi (sharing) dan belajar terkait dengan berbagai program inovasi pemerintahan.

“Kedatangan kami ke Badung adalah untuk bertukar informasi dan belajar tentang kiat-kiat Kabupaten Badung terkait pengembangan pariwisata, pelayanan publik serta regulasi Kabupaten Layak Anak (KLA),” ujar Sekretaris Daerah Sleman, Sumadi, di Puspem Badung, Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, kunjungan itu dilakukan ke Badung, karena Badung merupakan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang sudah berhasil dalam menjalankan program-program pusat untuk menunjang pembangunan dan sudah dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

“Hal itulah yang menjadi pertimbangan kami untuk me-

nimba ilmu dan berbagi kiat-kiat untuk kesejahteraan daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, pihaknya ingin mengetahui apa yang dilakukan jajaran pemerintahan Badung dalam menjaga kepariwisataan, pengarusutamaan gender, pelayanan anak serta pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga hasil kunjungan kami disini nantinya dapat diadopsi di Sleman dan menjadi bahan serta bekal untuk dapat kami terapkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Sleman,” kata Sumadi.

Dalam kunjungan itu, rombongan Kabupaten Sleman yang berjumlah 41 orang tersebut diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Putra Suteja.

Kadiskes Putra Suteja menjelaskan, secara geografis, Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan dengan



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Putra Suteja menerima Sekretaris Daerah Sleman, Sumadi saat mengunjungi Pusat Pemerintahan Badung, Bali, Rabu (10/4/2019). (Antaranews Bali/Humas Badung)

wilayah terbentang dari utara ke selatan yang berada di tengah-tengah Pulau Bali.

“Badung memiliki tiga prioritas pembangunan yaitu, di Kecamatan Petang dan Abiansemal sebagai prioritas pertanian dalam arti luas, Kecamatan Mengwi sebagai pusat pemerintahan sementara di wilayah Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan sebagai prioritas pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada kepemimpinan Bupati Badung, I

Nyoman Giri Prasta dengan Wabup I Ketut Suiasa, Pemkab Badung telah memberikan terobosan melalui berbagai program layanan kepada masyarakat yang telah dirasakan oleh masyarakat kabupaten Badung.

“Terkait dengan pengarusutamaan gender, pelayanan anak dan pelayanan kepada masyarakat, kami selalu memberikan yang terbaik dalam kebijakannya kepada masyarakat,” kata Putra Suteja. (adv)

Kejati Bali-Pemkab Badung Sosialisasikan Dana Desa



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa (kiri) berbincang dengan Kajati Bali Amir Yanto di Aula Kejari Badung, Selasa (9/4/2019). Antaranews Bali via Humas Badung

Kejaksanaan Tinggi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bersama tentang penggunaan dana desa yang diikuti para camat, perbekel atau kepala desa dan bendesa atau kepala desa adat se-Badung.

“Sosialisasi ini merupakan

salah satu peranan kami dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Badung. Kami dan Kejari Badung juga akan terus meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat,” ujar Kajati Bali Amir Yanto di Aula Kejari Badung, Selasa.

Kejaksanaan Tinggi Bali pada tahun 2018 menerima predikat

zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Di Tahun 2019 seluruh Kejaksaan di Bali juga diperintahkan untuk ikut dalam program zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“WBK ini bisa terlaksana karena dukungan dari masyarakat juga. Kejati mendapat predikat ini tidak lepas juga dukungan dari masyarakat dan kami akan terus meningkatkan birokrasi bersih dan pelayanan yang baik buat masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan, pihaknya berterima kasih atas peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung dalam mensosialisasikan fungsi serangkaian kegiatan penyuluhan hukum mengenai penggunaan dana desa.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai media sosialisasi tentang pelaksanaan penggu-

naan dana desa yang baik dari aspek normatif, administratif maupun teknis kepada segenap jajaran pemerintah di lingkungan Kabupaten Badung, khususnya bagi seluruh perbekel,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah desa diberikan peluang dan kesempatan untuk bisa berkembang dan mandiri, melaksanakan kewenangan dan juga anggaran yang diberikan negara kepada desa, harus dipergunakan untuk pembangunan di desa.

“Desa harus taat pada peraturan yang berlaku untuk mengelola dana tersebut dan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami harap perbekel dan bendesa adat nantinya memahami serta mengerti tentang penggunaan dana desa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Suiasa. (adv)

Badung Sosialisasikan Pengelolaan TPST Kepada Perbekel

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengumpulkan perbekel atau kepala desa dari 46 desa di wilayah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dirangkaikan dengan Penguatan Forum Perbekel Kabupaten Badung.

“Saya mengimbau para Perbekel dalam anggaran perubahan 2019 desa harus mengeluarkan Perdes tentang tempat sampah di masing-masing desa dan setiap desa harus memiliki TPST,” ujar Bupati Giri Prasta di Mangu-pura, Jumat.

Nantinya, pihaknya akan melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan sampah itu sehingga TPST dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Selain menyosialisasikan TPST, ia juga meminta kepada

desa-desa di Badung agar bisa menjadi desa digital, terlebih saat ini Kominfo telah memasang sarana prasarana internet gratis.

“Internet gratis sudah dipasang di masing-masing desa sehingga itu sangat mendukung bagi desa lain untuk beralih ke sistem digital,” ujarnya.

Selain desa digital, terkait dengan bedah rumah yang ada di masing-masing desa yang diharapkan tuntas tahun ini, para Perbekel diharapkan harus melakukan inovasi adektif sehingga bisa memutuskan sesuatu yang ada di lingkungan desa itu sendiri.

Perbekel juga diimbau dalam pembahasan APBD agar belanja publik harus lebih besar dari pada pembelanjaan aparatur dan program-program yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung harus dilanjutkan di



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menghadiri penguatan Forum Perbekel Kabupaten Badung bertempat di Mangu-pura, Badung, Jumat (5/4/2019). Antaranews Bali/Humas Badung

masing-masing desa.

“Desa harus bisa menunjukkan before dan after apa yang sebelum dilakukan dan pe-

rubahan yang terjadi setelahnya kemudian disosialisasikan ke masyarakat,” ujar Giri Prasta. (adv)

Pemkot Denpasar-Pegadaian Bersihkan Sampah Plastik di Pantai Mertasari



Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara bersama Pimpinan Wilayah Pegadaian Denpasar Nuril Islamiah. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara melakukan bersih-bersih sampah plastik di Pantai Mertasari bersama PT Pegadaian Persero dan Iwapi Denpasar, Sabtu, sebagai bentuk penerapan Perwali 36/2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Ia mengatakan kegiatan ini

merupakan bukti derap pembangunan di Kota Denpasar, terutama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik.

“Kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik harus disikapi dengan penuh kesadaran antara pemerintah, perusahaan, masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya dengan aksi nyata,” ujar Rai Iswara.

Sinergi baik yang tercipta tentu saja akan mempercepat capaian dalam mendukung program pembangunan di Kota Denpasar sesuai dengan visi misi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya.

Sementara Pimpinan Wilayah VII PT Pegadaian Nuril Islamiah mengatakan kegiatan bersih lingkungan yang dilaksanakan oleh keluarga besar Kanwil VII PT Pegadaian Persero bersinergi dengan DLHK Kota Denpasar, Iwapi Bali dan DPC Iwapi Kota Denpasar ini merupakan kegiatan serentak yang juga dilakukan pada waktu yang sama di 12 lokasi di seluruh Indonesia melibatkan kurang lebih 6.000 peserta.

“Kegiatan di Kota Denpasar ini yang melibatkan mencapai sekitar 500-an peserta dari segala lapisan masyarakat, kantor

perusahaan dan dinas,” katanya.

Selain dilaksanakan kegiatan bersih pantai, di tempat yang sama dilaksanakan pemecahan rekor MURI Pembukaan Tabungan Emas dan pembagian sekitar 1000 tas ramah lingkungan.

Kadis DLHK Kota Denpasar Ketut Wisada mengatakan sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan juga untuk mengurangi beban TPA Suwung, Denpasar maka DLHK Kota Denpasar telah mengadakan MoU dengan PT Pegadaian bersama pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 120 bank sampah di Kota Denpasar terkoneksi dengan aplikasi Sidarling (Sistem Aplikasi Sadar Lingkungan) dan melalui kerja sama dengan PT Pegadaian memungkinkan tabungan di bank sampah di Kota Denpasar dapat dikonversi ke dalam bentuk tabungan emas. (ant)

Prof. Nyoman Jampel Kembali Pimpin Undiksha

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. terpilih secara musyawarah dan mufakat untuk kembali memimpin Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Bali, sebagai rektor untuk periode 2019 hingga 2023.

“Pemilihan Rektor Undiksha berlangsung lancar, Selasa (2/4) siang, dengan musyawarah mufakat untuk memercayakan jabatan Rektor Undiksha kepada Nyoman Jampel,” kata Ketua Senat Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd, dalam keterangan pers di Singaraja, Rabu.

Ia menambahkan, pemilihan dengan musyawarah mufakat itu terjadi setelah adanya pernyataan dua calon lain, yakni Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd., M.Pd dan Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes yang sepakat untuk memercayakan jabatan rektor diembankan kembali oleh I Nyoman Jampel.

“Pernyataan itu disampaikan dalam surat, lengkap dengan

tandatangan di atas materai tertanggal 1 April 2019,” ujar dia.

Dalam proses pemilihan itu, Penerima Kuasa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Wisnu Sardjono Soenarso, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti menyebutkan dirinya sangat mengapresiasi karena pemilihan Rektor Undiksha berjalan sangat kondusif.

“Pascakeputusan ini, saya harapkan tidak akan ada lagi muncul persoalan dan tetap saling mendukung untuk membangun lembaga. Kita disini adalah keluarga besar Undiksha. Siapapun yang terpilih sebagai rektor harus didukung,” tegasnya.

Sementara Rektor I Nyoman Jampel mengatakan, pemilihan dengan musyawarah mufakat sebagai dampak dari implementasi konsep Tri Hita Karana pada civitas akademika.



Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. terpilih secara musyawarah dan mufakat untuk kembali menjadi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Bali, pada periode 2019-2023. (Foto Antaraneews Bali/Made Adnyana)

“Kami sampaikan berterima kasih kepada seluruh civitas akademika, khususnya Senat Universitas yang telah memercayakan kembali kepada saya sebagai rektor,” tambahnya.

Setelah pemilihan ini, pihaknya tetap menggenjot pelaksanaan program yang telah dirancang pada jabatan periode pertama maupun mempersiapkan implementasi visi masa ja-

batan empat tahun kedepan yang dipandang mampu mempercepat mewujudkan visi Undiksha sebagai universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.

“Tentu tetap akan menjalankan program yang telah dirancang. Tahun ini sudah ditetapkan sebagai internasionalization at home untuk Undiksha,” sebutnya. (ant)

Peremajaan Pasar Seni Sukawati Gianyar-Bali Mulai Dikerjakan



Pembongkaran bangunan Pasar Seni Sukawati secara simbolis oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Senin (15/4/2019). (ANTARA/Adi Luzuardi)

Proses peremajaan atau revitalisasi Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali, kini mulai dikerjakan dengan tahap pembongkaran yang pembangunannya akan dilaksanakan Kementerian PUPR pada awal Juli mendatang.

“Awal April lalu, pembongkaran dilakukan melalui mekanisme lelang secara daring (online) oleh tim Pemindahtanganan

dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang difasilitasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Denpasar,” kata Kabid Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kabupaten Gianyar, I Made Arianta, di Gianyar, Senin.

Arianta menjelaskan sebanyak 11 penawar yang mengajukan penawaran lelang untuk pengerjaan pembongkaran ini dan di-

menangkan oleh Ibu Pitria asal Kota Pekanbaru Riau dengan nilai Rp321 juta lebih. Proses pembongkaran akan dilaksanakan sampai bersih (rata tanah) selama 40 hari, mulai 15 April sampai dengan 24 Mei 2019.

“Pembongkaran dilaksanakan setelah pemenang lelang menyelesaikan kewajiban administrasi dan membayar lunas nilai penawaran tersebut ke kas daerah dengan difasilitasi KPKNL Denpasar,” kata Arianta saat pembongkaran bangunan Pasar Seni Sukawati secara simbolis oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra mengatakan proses pembongkaran ini merupakan tahap awal revitalisasi Pasar Seni Sukawati. Untuk pembongkaran biasanya Pemkab menganggarkan serta tidak ada batas waktu pembongkaran.

Namun, dengan sistem lelang selain batas waktu pengerjaan

yang terukur, juga ada pendapatan ke kas daerah yang berasal dari nilai penawaran yang diajukan pemenang lelang pembongkaran.

Dikatakan pula, proses revitalisasi Pasar Seni Sukawati ini akan dijadikan percontohan bagi proses revitalisasi pasar-pasar besar di Gianyar yang juga akan mengalami perbaikan.

“Hari ini, hari yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Kita bisa memulai proses revitalisasi Pasar Seni Sukawati yang merupakan kebanggaan Gianyar dan Bali. Yang merupakan salah satu pasar besar di Gianyar, yang menghidupi ribuan pedagang dan juga perajin-perajin seni yang ada di seluruh Gianyar. Pusatnya ada di sini. Syukur semua berjalan dengan kondusif, pedagangnya senang menerima revitalisasi ini, desa pakramannya senang, apalagi kami sebagai Pemerintah Daerah,” kata Mahayastra. (ant)

Sekda Bangli Terapkan Aplikasi Pengaduan Daring Untuk Masyarakat

Sekda Bangli, Bali, Ida Bagus Giri Putra, menerapkan sistem pengelolaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik melalui sistem aplikasi daring (online) yang dikenal SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

“Pelatihan asistensi untuk sistem aplikasi itu merupakan tindak lanjut program nasional kementerian-RB serta meningkatkan pelayanan publik tentang pelaporan dan pengaduan masyarakat,” kata IB Giri Putra, saat membuka pelatihan tersebut, Rabu (10/4), demikian siaran pers Diskominfo Bangli, Kamis.

Acara yang dipusatkan di ruang pertemuan Krisna Setda Kabupaten Bangli dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bangli, kepala OPD (organisasi pemerintahan daerah) beserta Admin di masing masing OPD, dengan narasumber Rosikin dari Kemenpan-RB.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Bangli I Made Kirman Jaya melaporkannya

bahwa Program SP4N adalah Program Nasional dari Kemenpan-RB, menindak lanjuti hal tersebut Kabupaten Bangli juga sudah membentuk admin Kabupaten untuk menjalankan aplikasi SP4N-LAPOR.

“Dari aplikasi tersebut pengaduan yang masuk dari semua unsur baik masyarakat dan perorangan kaitan dengan keluhan dan pelayanan semua masuk melalui aplikasi tersebut,” kata Kirman Jaya.

Dari Aplikasi tersebut kemudian dipilah untuk diteruskan ke masing masing OPD yang menangani melalui Operator di OPD tersebut, pada akhirnya informasi baik yang sifatnya keluhan dari manapun bisa langsung ditanggapi sesuai dengan OPD yang membidangi.

Dalam sistem ini juga ada indikator yang bisa dilihat dimana ketika aduan sudah masuk ke masing-masing OPD disana akan muncul sebuah tanda berwarna merah, berikutnya setelah aduan dibuka dan telah dibaca maka yang muncul adalah tanda berwarna Kuning



Pelatihan sistem pengelolaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik melalui sistem daring (online) yang dikenal SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Foto Humas Bangli

sampai pada akhirnya apabila aduan yang masuk dan sudah dibaca apabila sudah ditanggapi maksimal sampai Lima (5) hari maka akan muncul warna hijau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli IB Giri Putra menyatakan, “Seperti yang kita ketahui bersama SP4N-LAPOR dibentuk untuk merealisasikan “no wrong door policy” yang menjamin hak Masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara publik yang berwenang menan-

gani.”

Pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. lebih lanjut disampaikan pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta mengurangi potensi konflik dan membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. (ant)

Pemkab Klungkung Akan Uji Coba Bahan Bakar dari Sampah



Bupati Suwirta saat melihat industri pemindangan ikan di Desa Kusamba. Dirinya berharap, penggunaan kayu sebagai bahan bakar bisa diganti dengan pelet hasil daur ulang sampah, Kamis (11/4). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung)

Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali akan melakukan ujicoba bahan bakar dari hasil pengolahan sampah, untuk proses pengolahan industri ikan.

“Pengolahan ikan seperti pemindangan bisa menggunakan ‘pellet’ dari daur ulang sampah dalam pengolahannya. Hal itu, akan mengurangi penggunaan

kayu bakar dalam jumlah yang besar,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kamis.

Ia mengatakan, di Klungkung, ujicoba ini akan dilakukan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, sebagai sentra produksi pemindangan ikan kabupaten tersebut.

Menurutnya, penggunaan pelet sebagai bahan bakar, bisa

mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari pengolahan dengan menggunakan kayu.

Dengan digunakan sebagai bahan bakar, ia berharap, pelet sampah yang sejatinya digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik TOSS ini, juga akan berguna di sektor lain.

“Pelet sampah ini sudah pernah kita ujicobakan sebagai pengganti batubara, kami memasak makanan memakai kompor khusus pelet sampah dan hasilnya tidak menimbulkan aroma apapun, bahkan asap yang ditimbulkan pun sangat sedikit. Untuk itu saya sangat optimis uji coba ini akan berhasil,” katanya.

Dalam ujicoba ini, katanua, akan disiapkan tungku bahan bakar pelet sampah, dengan menghadirkan sejumlah pelaku pemindangan ikan, agar melihat langsung hasil dari bahan bakar ini.

“Semua langkah dan upaya yang kita lakukan selama ini tujuannya hanya satu, yakni mengatasi permasalahan sampah. Dengan banyaknya pemakaian pelet tentu akan dibutuhkan banyak pula sampah sebagai bahan pembuatnya,” katanya.

Salah seorang pelaku pemindangan ikan, Komang Suridep mengatakan, terdapat sebanyak 50 orang pelaku pemindangan di sentra pemindangan Desa kusamba.

Ia mengungkapkan, untuk memindang ikan, setiap orang bisa menghabiskan biaya sekitar Rp100 ribu perhari untuk membeli kayu bakar.

Menurutnya, selain biaya yang tinggi, pemakaian kayu bakar juga menimbulkan polusi udara, sehingga dirinya berharap uji coba penggunaan pelet sampah nanti, tidak akan menimbulkan aroma dan rasa yang berbeda pada olahannya. (ant)

Klungkung Pasang Alat Deteksi Gempa Bumi

Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali memasang seismograf untuk mendeteksi getaran gempa bumi, bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Stasiun Sanglah, Denpasar.

“Dengan adanya alat ini kami berharap bisa membantu Pemkab Klungkung menangani maupun mengambil langkah cepat apabila terjadi bencana alam. Instansi terkait saya minta memaksimalkan dan memanfaatkan alat ini,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima audiensi dari BMKG Stasiun Sanglah, Denpasar, Senin.

Untuk lahan yang diperlukan, pihaknya akan langsung mensurvei tanah milik pemerintah yang berdekatan dengan titik lokasi yang diinginkan, sehingga proses pemasangan alat tersebut cepat terealisasi.

Menurut dia, tanah untuk lokasi alat tersebut seluas sepu-

luh kali sepuluh meter persegi lengkap dengan bangunan dan pagar, yang apabila tanah itu merupakan aset desa, pihaknya akan berkoordinasi dengan desa setempat.

Senada dengan itu, Kepala Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar Ikhsan mengatakan Indonesia secara umum dan Bali pada khususnya merupakan daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi.

Karena itu, pemerintah melakukan penguatan peralatan pencatatan gempa bumi di seluruh Indonesia, yang pada tahun 2019 rencananya akan dipasang 100 sensor (seismograf) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk di Provinsi Bali mendapatkan dua buah sensor, salah satunya di Kabupaten Klungkung yang berlokasi Kepulauan Nusa Penida dekat Kantor Desa Batukantik dan Kantor Kepala Desa Klumpu.



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima audiensi dari BMKG Stasiun Sanglah, Denpasar untuk pemasangan alat seismograf di daerah tersebut, Senin (8/4). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung)

“Kami harapkan di titik lokasi yang sudah ditentukan lahannya milik pemerintah, karena terkait keamanan alat tersebut. Tak hanya itu, kami juga akan menambahkan alat seismometer sebanyak sembilan lokasi di Kabupaten Klungkung. Lima lokasi di Kepulauan Nusa Penida dan empat di Klungkung daratan,” katanya.

“Dengan tambahan sensor maka analisa dan penyebaran informasi gempa bumi di wilayah Bali dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Kami berharap pemasangan seismograf atau alat sensor getaran untuk membantu mendeteksi gempa bumi yang terjadi pada permukaan tanah,” katanya. (ant)

Pemkab Karangasem Siap Jadi Tuan Rumah “Jelajah Kota Pusaka Indonesia”

Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terpilih sebagai tuan rumah “Jelajah Kota Pusaka Indonesia tahun 2019” setelah Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dikukuhkan jadi Ketua Presidium JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) 2018-2019 dalam Rakernas VI JKPI 2018, menyiapkan diri sebagai tuan rumah ajang nasional itu.

Informasi Humas Karangasem yang diterima di Karangasem, Jumat, menyebutkan untuk mempersiapkan Festival Tingkat Nasional itu, pemkab setempat mengadakan rapat Pra-Rakornas ke-7 di Villa Taman Surgawi, Desa Tumbu, Karangasem, Bali, Kamis (4/4).

Selain dihadiri Bupati Karangasem sebagai Ketua Presidium JKPI, rapat ini juga dipimpin Direktur Eksekutif JKPI Asfarinal serta diikuti oleh Bupati Siak Hj. Alfredri, Bupati Balitung Timur Yusril Mahendra, Wabup Sam-

bas, Wabup Pasuruan, Wakil Walikota Bau-Bau, Wakil Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Sawah Lunto dan puluhan perwakilan kepala daerah anggota JKPI lainnya.

Bupati Karangasem Mas Sumatri selaku Ketua Presidium JKPI dalam rapat menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota JKPI dan menyampaikan kesiapan Kabupaten Karangasem dalam menyambut Rakornas JKPI pada bulan Juni mendatang.

Ia menjelaskan, di tengah tantangan sekaligus meningkatnya aktivitas Gunung Agung dengan total pengungsi mencapai 200.000 jiwa tersebar di 415 titik, Kabupaten Karangasem tetap berupaya survive. Dengan keyakinan penuh Pemkab Karangasem menjawab tantangan ini dengan berbagai terobosan Inovatif.

Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan dikemas



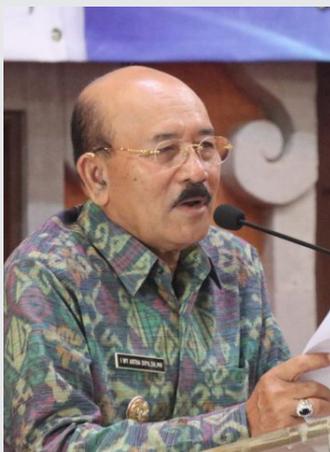
Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri saat membuka rapat pra-Rakornas JKPI. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

dalam satu program “Destination Branding”. Selaras dengan destination branding Kabupaten Karangasem yaitu Karangasem “The Spirit of Bali”, maka Pemkab Karangasem senantiasa berupaya untuk menjaga seluruh aset, terutama yang berelasi dengan mahakarya dari para pendahulu yang diwariskan dalam berbagai

bentuk.

Di antaranya, aset pusaka Budaya Ragawi seperti Puri Agung Karangasem, Puri Gede Karangasem, Taman Soekasada Ujung dan Taman Tirtagangga, aset Pusaka Budaya tak ragawi, Pusaka Saujana Desa Tenganan Pagringsingan dan berbagai aset Pusaka Alam Karangasem. (ant)

Wabup Karangasem Buka Penilaian Lomba Desa 2019



Wabup Karangasem Wayan Artha Dipa. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa membuka Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dalam kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Selasa.

Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dalam Tahapan Pe-

nilaian Pemaparan Perbekel yang dilaksanakan selama dua hari yaitu 9 April - 10 April 2019. Evaluasi Perkembangan Desa dilaksanakan dengan tujuan melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai Desember.

Kepala DPMD Karangasem, I Komang Agus Sukasena dalam laporannya memaparkan bahwa pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dalam bentuk pelaksanaannya berupa perlombaan desa merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi dimaksud merupakan salah satu ajang untuk meningkatkan motivasi terhadap kinerja pemerintahan desa beserta seluruh unsur lembaga kema-

syarakatan desa.

Agus Sukasena menambahkan bahwa setelah ditetapkan hasil pelaksanaan perlombaan desa, selanjutnya akan dilakukan pembinaan kepada desa yang ditetapkan untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Bali.

Selain itu juga dilaksanakan pembinaan khusus kepada desa yang ditemukan nilai evaluasi perkembangan desanya pada klasifikasi desa kurang berkembang.

Ia menjelaskan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2019 diikuti sebanyak delapan desa yaitu Desa Bungaya Kecamatan Bebandem, Desa Pertama Kecamatan Karangasem, Desa Bunutan Kecamatan Abang, Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen, Desa Padangbai Kecamatan Manggis, Desa

Duda Kecamatan Selat, Desa Pempatan Kecamatan Rendang dan Desa Kubu Kecamatan Kubu. Serta Kelurahan yang akan mewakili Kabupaten Karangasem dalam penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2019 yakni Kelurahan Karangasem.

Wabup Artha Dipa dalam sambutannya menyampaikan secara umum masyarakat pedesaan masih sangat memerlukan motivasi, dorongan, dan pembinaan untuk mampu lebih berdaya dan mengelola sumber daya/ potensi yang terdapat di Wilayahnya. Maka dari itu peran seorang pemimpin di Desa sangat dibutuhkan sekali, untuk menggali, merangkul dan membangkitkan semangat dan mendorong masyarakat desa untuk serta berpartisipasi membangun desanya. (ant)

Tujuh Buah Asli Jembrana Dapat Sertifikat Kementerian Pertanian

Tujuh buah asli Kabupaten Jembrana, Bali mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pertanian, sebagai tanda buah tersebut secara spesifik berasal dan ada di kabupaten tersebut.

“Ada beberapa jenis buah yang hanya ada di Kabupaten Jembrana, seperti buah kawista. Di kabupaten ini ada juga buah jeruju, yang bisa diolah menjadi obat herbal untuk bisul dan kanker,” kata Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali I Made Adijaya, yang lembaganya bertugas mendata dan mendaftarkan varietas spesifik daerah-daerah di Bali.

Ia mengatakan varietas atau buah spesifik suatu daerah itu harus dilindungi, agar ke depan tidak diklaim oleh satu pihak, serta bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal.

Menurut dia, tujuh buah asal Kabupaten Jembrana yang mendapatkan sertifikat meliputi buah kawista, pisang kayu, pi-

sang lumut, kelapa merah/gading, kelapa genjah hijau, jeruju serta salak gatri penyaringan.

Dengan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pertanian secara legal buah-buahan itu akan dilindungi oleh pusat perlindungan varietas kementerian terkait.

Sedangkan Bupati Jembrana I Putu Artha yang menerima langsung sertifikat tersebut mengatakan sertifikasi buah lokal itu penting untuk melindungi komoditas asli daerahnya.

Ia mengatakan varietas itu suatu saat bisa menjadi sumber ekonomi, dan yang terpenting tidak diklaim pihak lain karena sudah terlindungi lewat sertifikat tersebut.

Kepada dinas terkait ia memerintahkan agar kekayaan holtikultura itu dikembangkan, sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dari sektor pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Pan-



Bupati Jembrana I Putu Artha menerima sertifikat untuk tujuh buah Kabupaten Jembrana dari Kementerian Pertanian, sebagai legalitas buah tersebut berasal dari kabupaten tersebut, Senin (8/4). (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

gan Jembrana I Wayan Utama yang juga hadir dalam penyerahan sertifikat ini menambahkan, selain tujuh buah tersebut, pihaknya juga akan mendaftarkan buah jambu air budeng sebagai buah spesifik Jembrana.

Menurut dia, jambu budeng dengan rasa yang manis serta buahnya yang tebal, layak

mendapatkan sertifikat tersebut karena hanya bisa tumbuh dan berkembang di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana.

“Jambu ini tidak bisa hidup di daerah lain, karena sangat tergantung pada kontur tanah dan iklim. Selama ini, jambu budeng cukup dikenal di Kabupaten Jembrana,” katanya. (ant)

Tim Reaksi Cepat BPBD Jembrana Mendapatkan Pelatihan



Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyalami peserta pelatihan BPBD Jembrana, serta berpesan setelah pelatihan kemampuan mereka dalam memberikan pertolongan saat bencana harus meningkat, Kamis (4/4). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana)

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, Bali mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi bencana.

“Semua personel TRC BPBD Jembrana harus mengikuti

pelatihan ini dengan serius, karena penting untuk meningkatkan kemampuan. Dengan situasi alam yang tidak menentu seperti saat ini, kesiapsiagaan BPBD sangat penting,” kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat membuka pelatihan tersebut, di Negara, Kamis.

Ia mengatakan, tim reaksi cepat harus bergerak dengan cepat pula saat terjadi bencana, termasuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, karena saat bencana terjadi sering muncul persoalan-persoalan di lapangan yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat.

Ia mencontohkan, saat ada bencana banjir personel harus paham apa yang perlu disiapkan, termasuk menjalan standar operasional prosedur sehingga pertolongan bisa dilakukan dengan cepat dan akurat.

“Dengan tindakan yang cepat dan akurat, dapat meminimalisir korban maupun kerugian materi. Semua hal itu ada dalam pelatihan ini,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan, dalam rekrutmen anggota BPBD agar mengedepankan

kesehatan baik fisik maupun mental, karena menjadi bagian dari institusi tersebut harus memiliki fisik serta keberanian yang lebih.

Sementara Kepala BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana mengatakan, untuk pelatihan ini pihaknya mendatangkan instruktur dari BPBD Provinsi Bali, Basarnas, BMKG, TNI dan Polri.

“Target kami dengan pelatihan ini, kemampuan anggota dalam hal semangat, disiplin dan kinerja bisa meningkat, termasuk menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat khususnya saat terjadi bencana,” katanya.

Menurutnya, pelatihan ini akan dilakukan selama tiga hari, dengan dua hari pertama pemberian materi di dalam ruangan, dan pada hari ketiga akan dilaksanakan praktek di lapangan seperti simulasi. (ant)

Dinas Perpustakaan Buleleng Terbitkan Buku Tentang Kain Endek

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan buku berjudul “Membangkitkan Endek dan Songket Buleleng” yang berisi tentang sejarah, sentra pertemuan, berbagai motif dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan kain tenun itu.

“Dengan buku ini, generasi muda mengetahui bahwa Buleleng memiliki kekayaan yang diwariskan leluhur yakni berbagai jenis kain endek dan songket yang terus dikembangkan oleh perajin didukung program pemerintah,” kata Kadis Arsip dan Perpustakaan Buleleng dr. Sukarmini dalam keterangan pers yang diterima di Singaraja, Rabu.

Ia mengatakan tujuan penerbitan buku adalah untuk melestarikan tenun endek dan songket sehingga masyarakat, khususnya pengrajin tenun bisa sejahtera, karena itu pula pihaknya juga mengadakan bedah buku itu bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Buleleng di Gedung Laksmi Graha Singaraja pada Senin (1/4) lalu.

Saat menjadi narasumber dalam acara itu (1/4), Ketua Dekranasda Buleleng, I Gusti Ayu Aries Sujati Suradnyana, mengatakan kerajinan tenun ikat yang di Buleleng dikenal sebagai kain endek dan songket itu memang penting dilestarikan.

“Dalam sejarah perkembangannya, kain dan endek di Buleleng mengalami pasang surut. Dulunya, beberapa kain Songket, bahkan menggunakan benang serat emas dan perak dalam coraknya. Namun, seiring perkembangan zaman, maka corak itu tidak begitu banyak lagi ditemukan saat ini,” katanya.

Menurut dia, masing-masing desa yang menjadi sentra perkembangan endek dan songket memiliki motif dan corak yang berbeda-beda. Desa-desanya yang dinilainya masih melestarikan pertununan Endek atau Songket saat ini antara lain di Kelurahan Beratan, Desa Tejakula, Desa Sinabun, Desa Sawan, Desa Jinengdalem, dan Desa Kalianget.

“Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam membangkitkan kerajinan Endek dan



Bedah buku tentang Kain Endek yang diadakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Buleleng di Gedung Laksmi Graha Singaraja pada Senin (1/4) lalu. (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Songket ini antara lain kurangnya minat generasi muda untuk menggeluti kerajinan ini, dan bahan baku yang mahal serta sulit diperoleh,” kata Aries Sujati dalam acara yang juga menampilkan Ketut Rajin sebagai perajin Endek dari Desa Sinabun dan akademisi dan penulis, Kadek Sonia Piscayanti.

Dalam penuturannya, perajin endek dari Desa Sinabun, Ketut Rajin, mengaku awalnya mengalami kesulitan dalam pencip-

takan desain yang lebih inovatif dan bernuansa modern. Saat awal merintis usahanya, Rajin masih menggunakan desain dengan corak tradisional.

Namun, seiring usaha yang tak pernah surut, kini, dirinya sudah menghasilkan banyak motif endek yang berbeda. Meskipun mampu menciptakan desain baru yang modern, dirinya sampai sekarang masih mempertahankan ciri khas motif Endek dan Songket Buleleng. (ant)

Pemkab Buleleng-Kejari Buka Konsultasi Pengelolaan Dana Desa



Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Wahyudi, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menandatangani kesepakatan kerjasama untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan dana desa di Buleleng (9/4). (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Pemerintah Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) membuka konsultasi tentang pengelolaan dana desa agar kepala desa se-kabupaten setempat terhindar dari masalah hukum.

“Saya berharap seluruh kepala desa bertemu lah dengan kami dengan kapasitas sebagai pengacara negara, sesuai den-

gan fungsi kejaksaan yaitu sebagai pengacara negara yang bisa mendampingi kepala desa. Bukan sebagai penyidik, penyidik maupun sebagai penuntut umum,” kata Kepala Kejari Buleleng Wahyudi SH MH dalam siaran pers Humas Pemkab Buleleng yang diterima, Rabu.

Dalam sosialisasi Program Jaksa Jaga Desa dan Penan-

datanganan MOU mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, disiplin dan tertib anggaran, di Kantor Kejari Buleleng (9/4), ia mengatakan pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada kepala desa untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

“Saya ingin dana desa betul-betul sampai ke sasaran untuk pembangunan yang ada di desa. Untuk itulah kepala desa yang ingin berkonsultasi tentang pengelolaan dana desa bisa berkonsultasi kepada kami,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyatakan kepala desa harus hati-hati dalam mengelola dana desa karena 1 persen pun uang

pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Saya tidak ingin ada kepala desa yang tersangkut kasus karena menyalahgunakan dana desa. Kalau semua kepala desa menggunakan dana desa sesuai dengan aturan, semua program pembangunan di desa akan aman dari masalah,” katanya.

Untuk itu, katanya, kepala desa harus bisa membuat laporan program-program yang sudah dilaksanakan secara rinci. “Kepala desa tidak usah ragu berkonsultasi dengan Kejari Buleleng, karena Kejari pasti akan membukakan pintu selebar-lebarnya jika ada kepala desa yang ingin berkonsultasi, jika semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan pasti aman,” tegasnya. (ant)